EVALUASI TRIWULANAN

TRIWULAN I

DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BANTEN TA. 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya dalam memberikan kemudahan penyusunan Laporan Evaluasi Triwulanan Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Laporan Evaluasi Triwulanan OPD merupakan dokumen evaluasi dari realisasi pada program dan kegiatan – kegiatan di OPD per tiga bulan.

Dinas Perhubungan Provinsi Banten telah menyusun laporan Evaluasi Triwulan I (satu) sebagai salah satu dokumen menjadi acuan dalam mengevaluasi program dan kegiatan bulan Januari, Februari dan Maret 2023. Laporan Evaluasi Triwulanan OPD menyampaikan realisasi program / kegiatan berupa capaian keuangan, capaian fisik per sub kegiatan dengan dilengkapi permasalahan dan solusi pelaksanaan kegiatan.

Namun tidak lepas dari semua itu, penyusunan laporan mungkin terdapat kekurangan baik dari segi penyusun bahasa maupun segi lainnya. Oleh karena itu kami sangat berterimakasih kepada pembaca yang ingin memberikan saran dan kritik kepada kami sehingga kami dapat memperbaiki laporan evaluasi triwulanan ini.

Akhirnya penyusun mengharapkan semoga dari Laporan Evaluasi Triwulanan ini dapat diamanfaatkan untuk perbaikan pelaksanaan program / kegiatan berikutnya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BANTEN

TRI NURTOPO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19660530 199003 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Kegiatan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional adalah merupakan suatu langkah pendekatan spasial untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan yang secara substansi terdiri dari perencanaan. koordinasi dan pengendalian. Agar dalam proses perencanaan mendapatkan hasil yang optimal. maka diperlukan data dan wawasan pengalaman yang mendukung para perencana untuk mengembangkan idea dan gagasan sehingga hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan.

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dalam bidang perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang perhubungan.

Untuk mendapatkan hasil/kinerja yang optimal. pelaksanaan fungsi internal Dinas Perhubungan harus berjalan secara sinergis. sistematik serta terorganisasi dan saling mendukung/ melengkapi. Untuk itu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi mutlak diperlukan. karena akan berdampak langsung terhadap pencapaian kinerja Dinas Perhubungan khususnya dalam pelaksanaan tugas – tugas umum pemerintahan.

b. Dasar Hukum Kegiatan

1. Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
2. Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang - Undang No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial;
4. Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017-2022.
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan. Tugas Pokok. Fungsi. Tipe. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.
8. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 69);

c. Maksud Dan Tujuan

Maksud Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah pada kegiatan Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja kegiatan pada setiap bidang agar tercapai ketersediaan data tentang anggaran dinas perhubungan serta diperolehnya informasi yang akurat bagi para perencana dan pelaksana pembangunan dalam proses pengambilan keputusan maupun perumusan kebijakan.

Tujuan pelaksanaan Kegiatan adalah :

1. Menyusun rencana strategis pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan per triwulan dan akhir tahun;
2. Sebagai bahan untuk mengevalusi kegiatan di bidang-bidang di dinas perhubungan per triwulan dan laporan akhir kegiatan.
3. Menentukan solusi dari kendala yang dihadapi.

d. Ruang Lingkup Isi Laporan

Ruang lingkup isi laporan Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan bidang - bidang terkait di lingkungan Perhubungan Provinsi Banten mengenai proses pelaksanaan. permasalahan dan pencapaian target kinerja output;

2. Menyiapkan bahan evaluasi internal yang dilakukan secara rutin setiap bulan dan triwulan;
3. Menyusun laporan bulanan. triwulanan pada Kegitan Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Banten TA 2022;
4. Mengevaluasi Program Kegiatan pada bidang -bidang sebagai bahan pengendalian dan perencanaan selanjutnya.

BAB II
RENCANA KERJA DINAS

a. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2022

Dalam rangka menunjang pemerataan pembangunan di bidang transportasi dinas perhubungan provinsi banten memiliki tugas dan fungsi sebagai penetap kebijakan penyelenggaraan tranportasi darat. laut. udara dan perkeretaapian di provinsi banten. untuk menunjang tugas dan fungsi tersebut maka dinas perhubungan provinsi banten harus memiliki program dan kegiatan yang stategis agar tercapainya visi dan misi Gubernur Banten untuk menciptakan.

Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Banten memiliki empat Program. program tata kelola pemerintah. program penyelenggara dan lalu lintas dan angkutan jalan. program pengelola pelayaran dan pengelola perkeretaapian serta memiliki dua puluh satu kegiatan.

No	Program	Nama Kegiatan	Pagu
1	2	3	4
A	Tata Kelola Pemerintah		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.164.400.000
		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	450.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.084.822.763
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.466.600.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.712.950.000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.000.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	590.000.000
		Adminitrasi Umum Perangkat Daerah- UPTD	270.000.000

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah- UPTD	430.491.237
B	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**		
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	237.728.000
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.545.000.000
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	16.136.389.000
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	700.000.000
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - UPTD	155.000.000
C	**Program Pengelolaan Pelayaran**		
		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	570.000.000
		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	200.000.000
		Pembangunan. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan regional	30.000.000
		Pembangunan. Penertiban. Izin Pembangunan dan Pengopresian Pelabuhan Pengumpan Regional - UPTD	100.000.000
D	**Program Pengelolaan Perkeretaapian**		
		Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	398.850.000.

BAB III

REALISASI TRIWULAN I

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Bobot (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)													Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Keterangan
				Januari	(Rp. %)	(%)	Februari	(Rp. %)	(%)	Maret	(Rp. %)	(%)	Realisasi Triwulan I	(%)	Realiasi s.d bulan ini	(%)			
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**34.224.264.000,00**	**1.160.467.290,00**	**14**		**1.273.440.442**	**15**		**4.940.126.062**			**7.374.033.794**		**7.374.033.794**		**26.850.230.206**		
	1 **KegiatanAdministrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**38,98**	**21.164.400.000**	**507.278.019**	**2**	**11**	**599.815.292**	**3**	**7**	**4.167.312.154**		**2,27**	**5.274.405.465**	**25**	**5.274.405.465,00**		**15.889.994.535**		
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		20.449.570.000	507.278.019			522.720.292,00			4.124.684.654,00			5.154.682.965		5.154.682.965,00		15.294.887.035		
	2 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN		604.830.000	0,00			77.095.000,00			42.627.500,00			119.722.500		119.722.500,00		485.107.500		
	3 KOORDINASI DAN PELAKSANAN AKUNTANSI SKPD		50.210.000,00	0,00						0,00			0		0,00		50.210.000		
	4 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD		1.150.000,00	0,00			0,00			0,00			0		0,00		1.150.000		
	5 PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN		28.491.000,00	0,00			0,00			0,00			0		0,00		28.491.000		
	6 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN		29.824.000,00	0,00			0,00						0		0,00		29.824.000		Tidak ada

			BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD									0,00									
		7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		325.000,00	0,00						0,00			0		0,00		325.000		
	2		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**0,83**	**450.000.000**	**0,00**	**0**	**4,32**	**0,00**	**0**	**12**	**22.654.000,00**		**18**	**22.654.000**	**5**	**22.654.000,00**		**427.346.000**		
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100.000.000,00	0,00			0,00			17.130.000,00			17.130.000		17.130.000,00		82.870.000		
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		10.000.000,00	0,00			0,00			0,00			0		0,00		10.000.000		
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		10.000.000,00	0,00			0,00			0,00			0		0,00		10.000.000		
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		10.000.000,00	0,00			0,00			0,00			0		0,00		10.000.000		
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		10.000.000,00	0,00			0,00			0,00			0		0,00		10.000.000		
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		210.000.000,00	0,00			0,00			0,00			0		0,00		210.000.000		
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100.000.000,00	0,00			0,00			5.524.000,00			5.524.000		5.524.000,00		94.476.000		Tidak ada
	3		**Administrasi Umum Perangkat Daerah (INDUK)**	**2,00**	**1.084.822.763,00**	**33.827.417,00**	**3,12**	**5,66**	**53.727.417,00**	**4,95**	**8,36**	**62.267.338,00**		**6,99**	**149.822.172,00**	**14**	**149.822.172,00**		**935.000.591**		
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		450.000.000,00	33827417,00			33.827.417,00			59.479.428,00			127.134.262		127.134.262,00		322.865.738		
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		300.000.000,00	0,00			0,00			2.787.910,00			2.787.910		2.787.910,00		297.212.090		
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		65.000.000,00	0,00			0,00						0		0,00		65.000.000		
		4	Fasilitasi Kunjungan Tamu		22.500.000,00	0,00			0,00			0,00			0		0,00		22.500.000		

No.		PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Bobot (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)													Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Keterangan
					Januari	(Rp. %)	(%)	Februari	(Rp. %)	(%)	Maret	(Rp. %)	(%)	Realisasi Triwulan I	(%)	Realiasi s.d bulan ini	(%)			
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		147.322.763,00	0,00			19.900.000,00			0,00			19.900.000		19.900.000,00		127.422.763		
	6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100.000.000,00	0,00			0,00			0,00			0		0,00		100.000.000		Tidak ada
	4	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**0,05**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4,04**	**0,00**	**0,00**	**5,58**	**0,00**		**4,04**	**0,00**	**0**	**0,00**		**25.000.000**		Tidak ada kendala
	7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		25.000.000,00	0,00			0,00			0,00			0		0,00		25.000.000		
	5	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1,09**	**590.000.000**	**0,00**	**0,00**	**3,20**	**0,00**	**0,00**	**5,03**	**0,00**		**4,89**	**0,00**	**0**	**0**		**590.000.000**		
	10	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		590.000.000,00	0,00			0,00			0,00			0		0,00		590.000.000		
	6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (INDUK)**	**3,15**	**1.712.950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4,20**	**0,00**	**0,00**	**6,65**	**62.053.860,00**		**5,39**	**62.053.860,00**	**4**	**62.053.860,00**		**1.650.896.140**		
	11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		875.450.000,00	0,00			0,00			0,00			0		0,00		875.450.000		
	12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100.000.000,00	0,00			0,00			0,00			0		0,00		100.000.000		
	13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		737.500.000,00	0,00			0,00			62.053.860,00			62.053.860		62.053.860,00		675.446.140		

	7		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,06**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23,01**	**0,00**	**0,00**	**5,58**	**0,00**		**4,04**	**0,00**	**0**	**0,00**		**30.000.000**		Tidak ada
		14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		30.000.000,00	0,00			0,00			0,00			0		0,00		30.000.000		
	8		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15,59**	**8.466.600.000**	**615.651.754**	**7**	**7,31**	**619.897.733,00**	**7**	**9**	**619.052.733**		**7**	**1.854.602.220**	**22**	**1.854.602.220**		**6.611.997.780**		Tidak ada
		15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		8.466.600.000,00	615.651.754			619.897.733			619.052.733			1.854.602.220		1.854.602.220,00		6.611.997.780		
	9		**Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)**	**0,50**	**270.000.000,00**	**3.710.100,00**	**1,37**	**5,32**	**0,00**	**0,00**	**8,01**	6.785.977,00		**7,01**	**10.496.077,00**	**4**	**10.496.077,00**		**259.503.923**		
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		70.000.000,00	3.710.100,00			-			6.785.977			10.496.077		10.496.077,00		59.503.923		
		2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		200.000.000,00	0,00			0,00			0,00			0		0,00		200.000.000		
	10		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD)**	**0,79**	**430.491.237,00**	**0,00**	**0,00**	**4,04**	**0,00**	**0,00**	**5,58**	**0,00**		3,40	**0,00**	**0**	**0,00**		**430.491.237**		
		1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		240.000.000,00	0,00			0,00			0,00			0		0,00		240.000.000		
		2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		190.491.237,00	0,00			0,00			0,00			0		0,00		190.491.237		
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**				**18.774.117.000,00**	**75.321.605,00**			**83.374.000,00**	**46,94**		**243.739.092,00**		**4,61**	**402.434.697,00**		**402.434.697,00**		**18.371.682.303**		Tidak ada
	1		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**2,85**	**1.545.000.000,00**	**631.806,00**	**0,04**	**6,44**	**0,00**	**0,00**	**6,81**	**1.722.860,00**			**2.354.666,00**	**0**	**2.354.666,00**		1.542.645.334		**Tidak ada**

No.			PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Bobot (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)														Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Keterangan
						Januari	(Rp. %)	(%)	Februari	(Rp. %)	(%)	Maret	(Rp. %)	(%)	Realisasi Triwulan I	(%)	Realiasi s.d bulan ini	(%)				
		1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi		1.545.000.000,00	631.806,00			0,00			1.722.860,00			2.354.666		2.354.666,00		1.542.645.334		
	3		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	**29,72**	**16.136.389.000,00**	**74.689.799,00**	**0,46**	**3,83**	**10.624.000,00**	**0,00**	**6,85**	**169.266.232,00**		**8,06**	**254.580.031,00**	**2**	**254.580.031,00**		**15.881.808.969**		
		1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi		63.886.000,00	0,00			3.904.000,00			1.500.000,00			5.404.000		5.404.000,00		58.482.000		
		2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		13.737.243.000,00	74.689.799,00						161.046.232,00			235.736.031		235.736.031,00		13.501.506.969		
		3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		500.000.000,00	0,00									0		0,00		500.000.000		
		4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi		1.800.260.000,00	0,00			6.720.000,00			6.720.000,00			13.440.000		13.440.000,00		1.786.820.000		
		5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi		35.000.000,00	0,00			-			**0,00**			0		0,00		35.000.000		
	4		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi**	**1,29**	**700.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4,37**	**0,00**	**0,00**	**5,99**	**0,00**		**4,37**	**0,00**	**0**	**0,00**		**700.000.000**		Tidak ada
		1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		700.000.000,00	-			-			-			0		0,00		700.000.000		

	5		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**0,44**	**237.728.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4,76**	**0,00**	**0,00**	**4,75**	**0,00**		**4,02**	**0,00**	**0**	**0,00**		**237.728.000**		
		1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		237.728.000,00	0,00			0,00			0,00			0		0,00		237.728.000		
	6		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (UPTD)**	**0,29**	**155.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10,64**	**72.750.000,00**	**46,94**	**7,39**	**72.750.000,00**		**6,49**	**145.500.000,00**	**94**	**145.500.000,00**		**9.500.000**		
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara		155.000.000,00	0,00			72.750.000,00			72.750.000,00			145.500.000		145.500.000,00		9.500.000		
3			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**		**900.000.000,00**	**6.031.000,00**	**0,67**		**28.660.000,00**	**3,18**		**1.630.200,00**			**36.321.200,00**	**4,04**	**36.321.200,00**		**863.678.800,00**		Tidak ada
	1		**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi**	**1,0**	**570.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3,96**	**0,00**	**0,00**	**10,79**	**1.630.200,00**		**4,04**	**1.630.200,00**	**0**	**1.630.200,00**		**568.369.800**		
		1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		60.000.000,00	0,00			0,00			1.630.200,00			1.630.200		1.630.200,00		58.369.800		
		2	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin**		510.000.000,00	0,00			0,00			0,00			0		0,00		510.000.000		

			Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi																		
	2		**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan**	**0,37**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4,04**	0,00	0,00	5,58	0,00		4,04	**0,00**	**0**	**0,00**		**200.000.000**		83,33

No.			PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Bobot (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)													Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Keterangan
						Januari	(Rp. %)	(%)	Februari	(Rp. %)	(%)	Maret	(Rp. %)	(%)	Realisasi Triwulan I	(%)	Realiasi s.d bulan ini	(%)			
		1	**Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional (Pemantauan dan engawasan Kawasan Keselamtan Operasi Penerbangan**		200.000.000,00	0,00			0,00			0,00			0		0,00		200.000.000		
	3		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan regional (INDUK)**	**0,06**	**30.000.000,00**	**6.031.000,00**	**20,10**	**5,81**	**0,00**	**0,00**	**7,35**	**0,00**		4,89	**6.031.000,00**	**20**	**6.031.000,00**		**23.969.000**		Tidak ada
		1	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perijinan dan Pengoprerasian Pengumpan Regional		30.000.000,00	6.031.000,00			0,00			0,00			6.031.000		6.031.000,00		23.969.000		
	4		**Pembangunan, Penertiban, Izin Pembangunan dan Pengopresian Pelabuhan Pengumpan Regional (UPTD)**	**0,18**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5,23**	**28.660.000,00**	**28,66**	**10,80**	**0,00**			**28.660.000,00**	**29**	**28.660.000,00**		71.340.000		
		1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional (UPTD)		100.000.000,00	0,00			28.660.000,00			0,00			28.660.000		28.660.000,00		71.340.000		

4	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**		**398.850.000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**		**3,50**	**0,00**		**0,00**		**398.850.000**		Tidak ada
	1	**Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi**	**0,73**	**398.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2,18**	**0,00**	**0,00**	**3,97**	**0,00**			**0,00**		**0,00**		**398.850.000**		Tidak ada
		1 Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi		398.850.000,00	0,00			0,00			0,00			0		0,00		398.850.000		
JUMLAH			**100,00**	**54.297.231.000,00**	**1.241.819.895,00**	**2,29**		**1.385.474.442**	**3**		**5.185.495.354**			**7.812.789.691**	**14**	**7.958.289.691**		**46.484.441.309**		

g. Jadwal Pelaksanaan Tolok Ukur

Rapat Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan selama 1 (satu) hari. tanggal 28 Maret 2022 bertempat di Ruang Rapat Dinas Perhubungan Provinsi Banten.

Undangan dan peserta Rapat Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ini dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Kepala Bidang selaku Pejaabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Pejabat Pelaksana Teknis sub kegiatan dan staf yang membidangi laporan keuangan.

Maksud penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan data tentang penyerapan anggran di triwulan I pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten serta diperolehnya informasi yang akurat mengenai hambatan/masalah sehingga dapat diambil solusinya bagi para perencana dan pelaksana pembangunan dalam proses pengambilan keputusan maupun perumusan kebijakan.

Tujuannya. adalah tersedianya dokumen penyerapan di triwulan I sehingga memudahkan dalam penanganan hambatan yang ada sehingga dapat ditempuh langkah-langkah antisipasif dan strategis guna tidak terulang lagi permasalahan yang sama di triwulan II dan untuk memperbaiki kualitas penyerapan di triwulan berikutnya.

i. Kendala Pelaksanaan Tolok Ukur

- Bidang Sekretariat
  1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

     Untuk di triwulan I ini kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki kendala dan hambantan. penyerapan keuangan dan penyerapan fisik tidak sesuai dengan jadwal dan anggran kas yang ada;
  2. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

     Untuk kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di triwulan I ini memiliki kendala dalam penyerapan anggran dikarenakan pembayaran kegiatan bisa dibayar dibulan April untuk fisik sudah d laksanakan sesuai jadwal yang ditentukan;
  3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

     Untuk kegiatan di triwulan I ini tidak mengalami hambatan atau kendala yang berarti;
  4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Untuk kegiatan di triwulan III ini tidak mengalami hambatan atau kendala yang berarti;

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

   Untuk kegiatan ini di triwulan I sudah melakukan kegiatan sesuai jadwal. Tinggal menunggu pembayaran dibulan april;

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Kendala yang di alami oleh kegiatan ini di triwulan I adalah pembayaran bisa dilakukan dibulan april;

2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

   Kendala yang dialami oleh kegiatan ini adalah di pembayaran bisa dilakukan di bulan April sehingga kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan;

8. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Untuk kegiatan senam dan pengajian sudah dilaksanakan namun untuk pembayaran bisa dilakukan dibulan april;

- Bidang Angkutan Darat

1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau kendala yang terdapat pada kegiatan ini adalah Kegiatan sudah dilaksanakan tinggal menunggu pembayaran di bulan april.
2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi.

   Pada kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi di triwulan I kegiatan perjalanan dinas sudah dilaksanakan tinggal menunggu pencairan di bulan april.

3. Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi.

   Pada kegiatan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi di triwulan I untuk pemeliharaan peralatan mesin pintu perlintasan dan pemasangan CCTV di 8 (delapan) Pos Perlintasan wilayah provinsi banten sudah dilaksanakan tinggal menunggu pembayaran di bulan april

- Bidang Lalu Lintas.

1. Bina Keselamatan LLAJ di Jalan

   Kendala yang ada pada kegiatan ini di triwulan I adalah Kegiatan belum bisanya pencairan anggaran untuk pembayaran kegiatan perjalanan dinas dikarenakan pembayaran bisa dilakukan di bulan april.

2. Manajemen Rekayasa Lalau Lintas Jalan

   Pada kegiatan ini di triwulan I ada kendala dalam pekerjaan kontruksi

   a. untuk pekerjaan pemeliharaan perlengkapan jalan sudah dilaksanakan pekerjaannya namun ada hambatan dari pembayaran dikarenakan pembayaran bisa dilakukan di bulan April
   b. untuk belanja armature Non LED belum adanya pemenang tender dalam proses lelang
   c. Untuk Kegiatan Rapat Forum LLAJ Belum bisa dilaksanakan dikarenakan SK Forum dalam proses pengajuan ke biro hukum.

1. Pengawasan dan Pengendalian LLAJ

   Pada kegiatan ini di trwulan I untuk kegiatan pengaturan lalu lintas pimpinan daerah sudah dilaksanakan tinggal meunggu pembayaran di bulan april

- Kegiatan Bidang Pengembangan

1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi

   Untuk kegiatan ini di triwulan I mengalami kendala. proses penyerapan keuangan tidak sesuai dengan jadwal dan anggran kas yang ada dikarenakan pembayaran bisa dilakukan di bulan april.

- Kegiatan Bidang Laut dan Udara

1. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi

   kegiatan sudah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan tinggal menunggu pembayaran di bulan april

2. Penetapan Rencana Induk dan daerah Lingkungan Kerja (DRKL) daerah lingkungan kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional

   Kegiatan tidak ada kendala dikarenakan jadwal kegiatanya dilaksanakan di triwulan II;

3. Pembangunan. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan regional

   Kegiatan sudah dilaksanakan tinggal menunggu pembayaran di bulan april

- Kegiatan Bidang Perhubungan Darat UPT Serang

1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah - UPTD

Kendala yang terdapat pada kegiatan ini terdapat dalam keterlambatan proses pertanggungjawaban pengadmintrasian.

2. Adminitrasi Umum Perangkat Daerah- UPTD

   Di triwulan I ini hanya bisa pembayaran rutin seperti pembayaran tagihan listrik kantor untuk kegiatan lain menunggu pembayarannya dibulan April.

3. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

   Kendala yang terdapat pada kegiatan ini terdapat dalam keterlambatan proses pembayaran dikarnekan bisa dilakukan di bulan april.

4. Pembangunan. Penertiban. Izin Pembangunan dan Pengopresian Pelabuhan Pengumpan Regional - UPTD Kendala yang di hadapai oleh kegitan di triwulan I ini pada tolok ukur desiminasi pelayanan perhubungan untuk pembayaran spj bisa dilakukan dibulan april

j. Realisasi Pelaksanaan kegiatan

- Bidang Sekretariat

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Realisasi untuk kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah untuk keuangan sudah mencapai nilai sebesar 5.274.405.465. dari anggaran yang tersedia dengan presentase keuangan mencapai 24,92 %. dengan presentase fisik 24,93%;

2. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Realisasi untuk kegiatan ini keuangan sudah mencapai nilai sebesar 22.654.000. dari anggaran yang tersedia dengan presentase keuangan mencapai 5.03%. dengan presentase fisik 5.03%;

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Realisasi untuk kegiatan ini keuangan sudah mencapai nilai sebesar 96.746.043. dari anggaran yang tersedia dengan presentase keuangan mencapai 8.92%. dengan presentase fisik 9.03%;

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sudah mencapai nilai sebesar Rp. 1.860.783.330. dari anggaran yang tersedia dengan presentase keuangan mencapai 21.98%. dengan presentase fisik 22.00%;

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi untuk kegiatan ini samapai dengan triwulan ini belum ada realisasi keuangan

6. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

   Realisasi untuk kegiatan ini samapai dengan triwulan ini belum ada realisasi keuangan

7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Untuk kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Realisasi untuk kegiatan ini samapai dengan triwulan ini belum ada realisasi keuangan

3. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Realisasi untuk kegiatan ini samapai dengan triwulan ini belum ada realisasi keuangan

- Bidang Angkutan Darat

1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau

   Realisasi untuk kegiatan ini samapai dengan triwulan ini belum ada realisasi keuangan

2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi.

   Realisasi untuk kegiatan ini keuangan sudah mencapai nilai sebesar Rp. 2.354.666. dari anggaran yang tersedia dengan presentase keuangan mencapai 0.15 %. dengan presentase fisik 0.20 %;

3. Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi

   Realisasi untuk kegiatan ini samapai dengan triwulan ini belum ada realisasi keuangan

- Bidang lau Lintas Jalan

1. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi

   Realisasi untuk kegiatan ini keuangan sudah mencapai nilai sebesar Rp. 249.176.031. dari anggaran yang tersedia dengan presentase keuangan mencapai 1.54%. dengan presentase fisik 1.81%;

- Bidang Pengembangan

1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi

   Realisasi untuk kegiatan ini samapai dengan triwulan ini belum ada realisasi keuangan

- Bidang Laut dan Udara
  1. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi

     Realisasi untuk kegiatan ini samapai dengan triwulan ini belum ada realisasi keuangan
  2. Penetapan Rencana Induk dan daerah Lingkungan Kerja (DRKL) daerah lingkungan kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional

     Realisasi untuk kegiatan ini samapai dengan triwulan ini belum ada realisasi keuangan
  3. Pembangunan. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan regional

     Realisasi untuk kegiatan ini samapai dengan triwulan ini belum ada realisasi keuangan
- Bidang UPT Darat Serang
  1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah- UPTD

     Realisasi untuk kegiatan ini samapai dengan triwulan ini belum ada realisasi keuangan
  2. Adminitrasi Umum Perangkat Daerah- UPTD

     Realisasi untuk kegiatan ini keuangan sudah mencapai nilai sebesar Rp. 10.496.077. dari anggaran yang tersedia. dengan presentase keuangan mencapai 3.89%. dengan presentase fisik 3.89%.
  3. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

     Realisasi untuk kegiatan ini samapai dengan triwulan ini belum ada realisasi keuangan
  1. Pembangunan. Penertiban. Izin Pembangunan dan Pengopresian Pelabuhan Pengumpan Regional - UPTD

     Realisasi untuk kegiatan ini samapai dengan triwulan ini belum ada realisasi keuangan ;

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Laporan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah pada kegiatan Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah diharapkan dapat mengevaluasi kinerja dari bidang -bidang di Dinas Perhubungan Provinsi Banten dari kegiatan sebagai berikut:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
9. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
10. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
11. Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi
12. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
13. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
14. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi
15. Penetapan Rencana Induk dan daerah Lingkungan Kerja (DRKL) daerah lingkungan kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
16. Pembangunan. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan regional
17. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah–UPTD
18. Adminitrasi Umum Perangkat Daerah- UPTD
19. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
20. Pembangunan. Penertiban. Izin Pembangunan dan Pengopresian Pelabuhan Pengumpan Regional - UPTD

Kesimpulan :

Penyusunan Laporan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dalam upaya mengevaluasi kinerja di bidang-bidang di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Banten dan hasil dari pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan sasaran yang direncanakan di triwulan I karena belum memenuhi target dikarenakan realisasi bisa dibayarkan di triwulan II.

Saran :

Diperlukan adanya kordinasi yang baik antar PPTK dan PPTSK dan Koordinasi yang baik dengan subbagian Keuangan sehingga dapat mempelancar kegiatan yang akan dilaksanakan serta dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat.